

Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Lusiana Kanji

Email : kanjii.lusiana@gmail.com

Dosen Program Studi Akuntansi STIEM Bongaya

Corresponding Author

Nama Author : Lusiana Kanji

Email: kanjii.lusiana@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.70178/icbrj.v4i1.108>

Received: 31 Agustus 2024, Revised: 01 September 2024, Accepted: 03 September 2024:

Published: 03 September 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Pengumpulan data menggunakan data primer yang di peroleh dari kuesioner dengan menggunakan rumus Slovin. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, sedangkan sampel yang di ambil berjumlah 83 responden. Hasil kuesioner tersebut telah di uji validitas dan reliabilitasnya, juga telah di uji asumsi klasik berupa asumsi normalitas dan asumsi heteroskedastisitasnya. Metode analisis data menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata kunci : Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik , Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Abstrack: *This study aims to determine the Application of Public Sector Accounting Reporting Standards and Regional Financial Oversight of Performance Accountability of Government Agencies at the Makassar City Public Works Service. Data collection uses primary data obtained from questionnaires using the Slovin formula. The population is all employees of the Makassar City Public Works Office, while the sample taken is 83 respondents. The results of the questionnaire have been tested for validity and reliability, and classical assumptions have been tested in the form of normality assumptions and heteroscedasticity assumptions. Methods of data analysis using multiple regression techniques. The results of the study show that the application of Public Sector Accounting Reporting Standards and Regional Financial Supervision has a positive and significant effect on Government Agencies Performance Accountability.*

Keywords: *Public Sector Accounting Reporting Standards, Regional Financial Supervision, Performance Accountability of Government Agencies*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (*good government*) sebagai syarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi warga serta mencapai cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu sistem akuntabilitas yang terukur dan legal perlu dikembangkan dan dilaksanakan agar pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan bersih serta bertanggungjawab dan bebas dari budaya korupsi, kolusi serta nepotisme (Fifi Juliastuti S, dkk., 2022).

Pemberlakuan aturan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual di ungkapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai kewajiban dan Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengimplikasikan kebijakan reformasi keuangan negara/daerah dalam rangka penyelenggaraan good government pada pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia. Salah satu prinsip strategis yang perlu dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, sistem dan kelembagaan harus diperkuat sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan yang berlaku serta perundang-undangan (Nasution. 2019)

Akuntabilitas secara akurat tersebut tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan demi terwujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih dan akuntabel, diyakini perlu adanya laporan akuntabilitas instansi pemerintah untuk menentukan visi misi dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (Fifi Juliastuti S, dkk., 2022).

Pengelolaan keuangan daerah belum bisa dikategorikan sempurna dalam pelaksanaannya, masih adanya kendala-kendala yang perlu diperbaiki di dalamnya. Secara khusus terdapat permasalahan akuntansi yang menjadi salah satu kendala teknis bagi pelaksana pengelolaan keuangan daerah dalam situasi tertentu, seperti implementasi standar akuntansi pemerintah yang merupakan kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan pada pengelolaan keuangan negara saat ini (Nasution, 2018). Standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan berguna agar memenuhi ketetapan ekonomi, sosial, dan politik yang lebih baik untuk pengguna laporan keuangan serta membantu memenuhi kebutuhan informasi keuangan. Penerapan akuntansi keuangan membantu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk menyajikan informasi tentang tujuan, fungsi dan objek pengeluaran (Ajhar, Akram, 2015).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan visi dan misi instansi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja (Sumadya, dkk., 2014). Menurut Indra Bastian (2010:88) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah: “Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk pertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Menurut Suwanda (2015) standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2011: “Pengawasan keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.”

Hasil penelitian terdahulu mengacu pada Ramdhanu (2019) yang membuktikan bahwa penerapan laporan akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah studi pada bapenda Provinsi NTB secara parsial variabel pengawasan laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan variabel penerapan laporan akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitu juga dengan penelitian Pamungkas (2012) yang menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka menunjukkan akuntabilitas kinerja, maka antara lain diperlukan akuntabilitas keuangan yang dapat mengukur dan menilai upaya capaian hasil. Karena begitu beragamnya hasil penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk meneliti dengan judul penelitian “pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas pekerjaan umum kota Makassar”.

II. Literatur Review

Teori Entitas

Dalam teori entitas dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggung jawab kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggung jawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya. (Arini, dkk 2020).

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Di jelaskan pula mengenai entitas pelaporan dalam undang-undang pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang berbunyi "Tiap-tiap kementerian negara / lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk di gabungkan pada entitas pelaporan.

Akuntabilitas

Salah satu unsur yang lain dari konsep pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan adanya akuntabilitas dimana konsep dan pengungkapan perlunya akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban menyajikan dan mengungkapkan segala aktvitasnya dan

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Menurut Deddi Nordiawan (2006:35) Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang di percayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan secara periodic. Dengan kata lain akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/ atasannya. Dalam hal ini terminology akuntabilitas di lihat dari sudut pandang pengendalian tindak pada pencapaian tujuan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan melalui system pertanggung jawaban secara periodic. Dalam pedoman menyusun pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan akuntabilitas instansi pemerintah harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat mengintegrasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Oleh karena itu perlu di buat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini perlu pula di jelaskan proses pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif. Sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan rinci. Apabila memungkinkan dapat dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketetaan dan efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun system dan proses pelaksanaannya.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses dalam mengumpulkan, mencatat, mengklarifikasikan, analisis dan juga membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang memberikan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Teori akuntansi sangat berkaitan erat dengan akuntansi keuangan terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Sebenarnya teori akuntansi sektor publik sendiri masih dipertanyakan Apakah teori akuntansi sektor publik memang ada. Seiring berjalannya waktu mulai muncul suatu tuntunan baru agar sebuah organ organisasi sektor publik dalam mempertimbangkan value for money. Value for money merupakan Konsep Pengelolaan sektor publik yang berdasarkan 3 elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Tetapi ada beberapa pihak yang menambahkan 2 hal dalam pokok value for money yaitu keadilan dan pemerataan. Dengan itu ada beberapa manfaat yang dimiliki oleh value for money yaitu dapat meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik, dan juga meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menurunkan biaya untuk pelayanan publik. (Nurfasila., 2022)

Laporan keuangan sektor publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Menurut (Mardiasmo, 2009) Sektor publik merupakan organisasi yang

kompeks dan heterogen. Adanya tuntunan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Selama ini akuntansi identik dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan saja. Tantangan yang di hadapi akuntansi sektor publik adalah mampukah akuntansi menyediakan informasi yang dapat di gunakan untuk memonitor akuntabilitas manajemen, akuntabilitas poltik, dan akuntabilitas kebijakan.

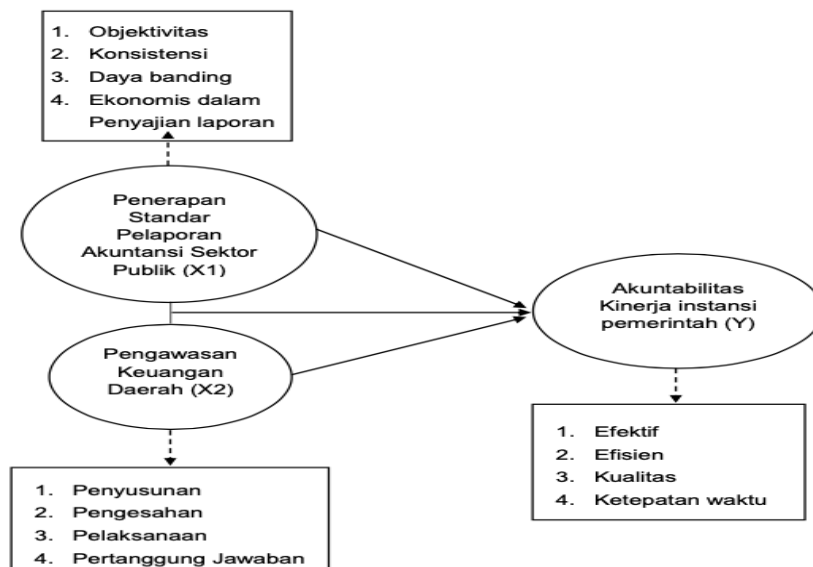
Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Maka dibentuklah sebuah standar akuntansi pemerintah yang kredibel yang dibentuk oleh komite SAP pada tanggal 8 Mei 2008. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparansi serta akuntabilitas (Nordriawan., 2008:23)

Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Veny Marlana, Subaeti (2018). pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya untuk menerapkan good governance (pemerintahan baik).

Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis :

H1 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H2 : Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

III. METODOLOGI

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu mengukur dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait (Kuncoro, 2011:19) Menurut jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang di sertai data stastistik dan pola hubungan antara variabel. Pada penelitian ini variabel terikat akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar (Y) Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik (X1) dan pengawasan keuangan daerah (X2). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, sedangkan sampel yang di ambil berjumlah 83 responden. Tekhnik Analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linear sederhana dengan alat bantu sofeware SPSS versi 22. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$\hat{Y} = a + B1 X1 + \beta2 X2 + e$$

Keterangan

Y : Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

a : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X1:Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik

X2:Pengawasan Keuangan Daerah

e :Error

IV. HASIL PENELITIAN

Sampel yang di ambil peneltian ini ada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar berjumlah 83 responden. Dari 83 kuisisioner yang di bagikan 100 tingkat pengembalian adalah 100%. Berdasarkan uji SPSS 26, maka di dapatkan suatu model Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1.539	1.563
	standar pelaporan akuntansi sektor publik	1.047	.095
	pengawasan keuangan daerah	.865	.135

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan reaksi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 1.539 + 1.047X1 + 0.865X2$$

Hasil persamaa tersebut dapat diketahui bahwa Nilai konstanta α (nilai mutlak Y) = 1.539 artinya jika penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan keuangan daerah

konstan atau (nol) maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bernilai 1,539 atau akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat. Nilai koefisien regresi variabel pengawasan keuangan daerah (X2) sebesar 0,865 artinya jika pengawasan keuangan daerah mengalami kenaikan 1, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mengalami kenaikan sebesar 0,865 dengan asumsi variabel lain konstan. Sedangkan hasil uji hipotesis dapat di lihat pada tabel berikut :

Model	t _{hitung}	t _{tabel}	Signifikasi
Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik	0,10991	0,2172	0,000
Pengawasan keuangan daerah	0,6397	0,2172	0,000

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan diatas penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik (X1) dimana nilai thitung sebesar 0,10991 dan nilai ttabel sebesar 0,2171 serta nilai signifikannya $0,000 < 0,05$, maka pada tingkat kekeliruan 5% maka H_a di terima dan H_0 di tolak. Artinya dapat dikatakan bahwa penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut menunjukkan hipotesis di terima. Sedangkan untuk pengawasan keuangan daerah (X2) dimana nilai thitung sebesar 0,6397 dan nilai ttabel sebesar 0,2171 serta nilai signifikannya $0,000 < 0,05$, maka pada tingkat kekeliruan 5% maka H_a di terima dan H_0 di tolak. Artinya dapat dikatakan bahwa pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut menunjukkan hipotesis di terima.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Hasil pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini menunjukkan bahwa penerapan standar pelaporan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik (X1) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Teori entitas dalam penelitian ini jika di kaitkan dengan penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik yang di pengaruhi oleh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Teori entitas memandang bahwa Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujud good governance dalam pengelolaan organisasi publik. tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Winda Riva Rahmawati (2022), Nurfasila (2022), dan Arini novandalian, Fidyah Yuli Ernawati (2020) yang menunjukkan bahwa Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini mengidentifikasi bahwa yang menerapkan akuntansi sektor publik memiliki kualitas laporan keuangan yang baik.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Berdasarkan Hasil pengujian pada tabel 5.15 di atas maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikan konstanta variabel independen. Di mana signifikasinya $0,000 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Dalam teori entitas mengidentifikasi bahwa organisasi yang mempunyai pengawasan keuangan yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan, sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Oktaviani Aulia (2021), Windra Ulwia Rehat, Nining Asniar Ridzal (2021), dan Ilmi Rafarni Gea (2021) yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan : (1) Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Keterbatasan : peneliti berikutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti Peneliti terdahulu.

REFERENSI

- Ajhar, Akram, E. P. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis Akrua dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Mataram*, 3(1), 62–73.
- Andini, Dewi dan Yusrawati. (2015) Pengaruh kompetensi sumber daya manusia keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan akuntansi*
- Arini Novandaline, Fidyah Yuli Ernawati, (2020). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan dinas perhubungan kota semrang. *Jurnal STIE Semarang*.

- Annisa Ayu Riyanu, Tituk Diah Widajantie, 2022. Pengaruh standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal ilmiah MEA (Manajemen, ekonomi dan Akuntansi)* vol. 6 No. 2 2022.
- Bastian, 2010. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Ketiga)*. Erlangga. Jakarta
- Basri. Yesi Mutia. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada
- Eldis Ramdani dan Neo Agustina, 2019. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten aceh utara. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*.
- Fauzan, R. H., Nasir, A., & Silalahi, S. P. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provin (Doctoral dissertation, Riau University). *JOM Fekon* Vol. 4. No 1.
- Fifi Juliastuti S., dkk. (2022). Pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan pengendalian akuntansi sebagai variabel moderasi. *ISAFIR Islamic Accounting and Finance Review* ISSN 2797-166x Volume 3, Nomor 1, Edisi Juni 2022
- Galih Suprajaa, S. E., M. Si, 2019. Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Dosen fakultas sosial sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Gendro, Wiyono. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM.
- Ghozali, Imam, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate*, Edisi ke-8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanifa, Lia, Andi Basru Wawo dan Husain. Pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan sistem keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal progres ekonomi pembangunan*, I, no. 2 (2016) : h. 65- 80.
- <http://putr.sulselprov.go.id>
- Ilmi Rafarni Gea, 2021. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan manajemen*.
- Kurnia Rahmah, 2018. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah SAP berbasis akrual dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul. (studi empiris pada instansi pemerintah kabupaten Gunungkidul DIY). *Jurnal kajian Bisnis*.
- Kuncoro. 2011. *Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPM
- Maryani, Novita iis. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Artikel*, (2016) : h. 1-9
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moehariono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Edisi Revisi)*. Rajagrafindo Persada: Depok
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*.
- D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 30–43.

- Nordiawan, 2008. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta : Kencana.
- Nurfasila. 2022. Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Fraud. (Studi Kasus BKUD Kab. Pinrang)
- Oktaviani Aulia, 2021. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah (opd) kota pekanbaru. Program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- PDF LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP TAHUN 2018 PERPRES No. 29 TAHUN 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Ponamon, Irene Fransisca, 2018. Pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Kota Manado. Jurnal ekonomi.
- Putri ariella Belinda, Nevi costari, 2021. Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintah. Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung.
- Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Keranga, Standar dan Metode. Surabaya: Bandung : Alfabeta
- Siregar, S (2014). Metode penerapan akuntansi sektor publik. Jurnal Unikom.
- Syahruddin. 2015. Lab. Pengolahan Data SPSS. STIEM Bongaya Makassar.
- Septiani. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Grage Akuntansi, Sugiyono. 2018. Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Veny Marlana, Subaeti, 2018. pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasankualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi bengkulu (Studi Kasus: BPKD, Inspektorat, DPMD dan DPRD di provinsi bengkulu). Jurnal ekonomi UNIHAZ-JAZ
- Windra Ulwia Rehat, Nining Asniar Ridzal 2021. Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja (studi kasus pada dinas perhubungan kota baubau). Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas UMButon ISSN (online): 2747-2779
- Winda Riva Rahmawati, Heliana, 2022. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung Indonesia.
- Yevi Dwitayanti, 2019. pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten banyuasin. Jurnal Akuntanika ISSN 2407-1072.